

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai Kehidupan dalam Pembentukan Sikap Anti Korupsi Warga Negara Muda

Syifa Siti Aulia

Dosen PPKn, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan
fa_auliamahyar89@yahoo.co.id

Abstrak

Makalah ini mengkaji mengenai pengembangan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program kulikuler di persekolahan dan perguruan tinggi yang dapat menjembatani permasalahan korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan orang lain. Korupsi di Indonesia sudah bertransformasi dari tindak pidana biasa menjadi patologi sosial yang sangat berbahaya dan mengancam semua lini kehidupan masyarakat Indonesia. Korupsi yang semakin menggerogoti bangsa ini mencerminkan degradasi moral dan kegagalan proses pendidikan Indonesia saat ini, maka Pendidikan Kewarganegaraan berbasis nilai kehidupan warga negara muda dalam makalah ini dikaji sebagai suatu proses pembelajaran bagi warga negara muda untuk membentuk sikap anti korupsi. Penyajian makalah ini dibangun dalam tataran konseptual dan praktis sederhana mengenai pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis nilai-nilai kehidupan serta proses pembentukan sikap anti korupsi melalui pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai-nilai kehidupan. Penyajian konseptual dalam makalah ini diharapkan dapat menjadi alternatif pengembangan model pendidikan karakter terutama pembentukan sikap anti korupsi di program kulikuler pendidikan kewarganegaraan baik dalam tatanan persekolahan maupun perguruan tinggi.

Kata Kunci : Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Berbasis nilai kehidupan Warga Negara Muda, Sikap Anti Korupsi

PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan dalam arti luas mencakup beberapa konteks pengembangan yakni pendidikan dalam wahana subsistem pendidikan formal, non formal, dan informal. Keseluruhan subsistem pendidikan tersebut berkaitan dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dalam pembentukan warga negara yang cerdas dan baik.

Secara konseptual Pendidikan Kewarganegaraan dalam dimensi program kulikuler kewarganegaraan menjadi bagian yang terikat kuat dengan tujuan

pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan dalam dimensi program kulikuler mempunyai kontribusi penting dalam membentuk dan mewujudkan karakter bangsa yang dicita-citakan yaitu *smart and good citizenship* seperti ditegaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa aspek kepribadian warganegara yang perlu dikembangkan adalah menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman.

Pendidikan Kewarganegaraan menjadi sangat strategis di tengah upaya pemerintah dalam membangun karakter bangsa mulai jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi salah satu instrument yang fundamental dalam bingkai pendidikan nasional sebagai media pembentukan karakter bangsa (Zuriah, 2007). Kestrategisan Pendidikan Kewarganegaraan untuk menanamkan nilai-nilai dapat dimaksimalkan sebagai transmisi pembentukan sikap anti korupsi dalam pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan berbasis nilai.

Bertolak dari latar belakang tersebut, makalah ini akan mengkaji mengenai implementasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis nilai kehidupan dalam pembentukan sikap antikorupsi warga negara muda. Fokus utama tulisan ini bertolak dari asumsi bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program kulikuler di perguruan tinggi maupun persekolahan dengan program-program pembelajarannya mampu muncul sebagai bentuk pendidikan nilai salah satunya membentuk sikap anti korupsi. Sebagaimana dikemukakan oleh (Cogan, 1998:4) menegaskan bahwa “*civic education, the foundational course work in school designed to prepare young citizen for an active role in their communities in their adult lives*”. Maknanya bahwa karakter warga negara dibentuk melalui Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan persekolahan maupun perguruan tinggi untuk menjadikan warga negara muda kelak dapat berperan aktif dalam kehidupan masyarakatnya.

Hal tersebut di atas senada dengan pendapat Kerr (Winataputra & Budimansyah, 2007:4) yang menyatakan bahwa:

Citizenship or civics education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens

and, in particular, the role of education (through schooling, teaching, and learning) in that preparatory process. Atau pendidikan kewarganegaraannya dirumuskan secara luas mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar, dalam proses penyiapan warga negara tersebut.

Asumsi lainnya berkaitan dengan pengembangan pendidikan karakter melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang dibangun berdasarkan nilai-nilai kehidupan warga negara dianggap mudah untuk diinternalisasi dan diimplementasikan sebagaimana dikemukakan sebagai berikut “...*the character education method should be developed based on these characteristics: First, living values-based character education, which means that it is based on living values so it will be easier to be internalized and implemented...*” (Komalasari, 2012)

Asumsi-asumsi di atas tersebut menjadi bahan acuan bahwa pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program kulikuler di perguruan tinggi maupun persekolahan hendaknya mampu mengantarkan warga negara muda untuk mampu siap menjajaki kehidupan berbangsa dan bernegara dengan pembentukan sikap sebagai warga negara yang baik termasuk di dalamnya berkaitan dengan proses pendidikan karakter yang hendak membentuk sikap anti korupsi warga negara muda.

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai-Nilai Kehidupan

Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai proses pembinaan warga negara serelevan mungkin disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan nasional, sehingga tujuan utama dari Pendidikan Kewarganegaraan tidak terlepas dari penyesuaian warga negara muda sebagai bagian dari warga negara dalam negaranya bahkan lebih luas sebagai bagian bangsa di seluruh lapisan dunia.

Relevansi pengembangan program kulikuler Pendidikan Kewarganegaraan tersebut dengan pembangunan nasional hakikatnya mengikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam koridor “*value-based education*” sebagaimana dikemukakan bahwa “...Pendidikan Kewarganegaraan secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang

mengusung nilai-nilai (*Content embedding values*) dan pengalaman belajar (*Learning experiences*) (Winataputra dan Budimansyah, Ed.2012)

Sebagaimana konsep pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan yang telah dikemukakan di atas penerapan Pendidikan Kewarganegaraan harus diadaptasi secara umum dari dasar filosofis kehidupan nilai-nilai masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memperkuat potensi Pendidikan Kewarganegaraan yang akan membangun manusia yang memiliki kompetensi menyeluruh baik dari segi keterampilan, pengetahuan, maupun perilaku.

Tujuan yang diharapkan dari pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan tersebut terbingkai melalui posisi ideologi, agama, dan budaya sebagai dasar filosofis kehidupan masyarakat yang utama (Sumantri, 2008). Tiga elemen dan konsep dasar dalam pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan di atas dapat diimplementasikan secara menyeluruh dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Program Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dirancang dengan dasar bahwa ideologi sebagai refleksi aktifitas kehidupan warga negara, maka nilai-nilai kehidupan yang bersumber dari Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dijadikan rujukan dalam pengembangan materi, metode, media, sampai pada tahapan evaluasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Agama yang dijadikan kekuatan dari Pendidikan Kewarganegaraan isinya mengkonfirmasi bahwa sang pencipta dibalik segala tindakan warga negara, sehingga dalam implementasi program kulikuler Pendidikan Kewarganegaraan menjadikan nilai-nilai agama sebagai nilai dasar dalam pengembangan program pembelajaran

Elemen terakhir yakni budaya sebagai kegiatan praktis aktifitas kehidupan warga negara. Budaya masyarakat Indonesia yang terikat kuat dengan nilai-nilai kehidupan dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menjadi bagian yang terintegrasi dengan pengembangan pendidikan karakter . Implementasinya proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai kehidupan tersebut dikembangkan dari pemikiran tentang komponen karakter baik yang dibentuk melalui pendidikan karakter sebagaimana dikemukakan Lickona (1991) yang terdiri pengetahuan moral (*moral knowing*), perasaan moral (*moral feeling*), dan tindakan moral (*moral behaviour*). Komponen karakter baik tersebut

dalam budaya masyarakat Indonesia dapat dikembangkan menjadi nilai-nilai kehidupan yang dapat dibentuk melalui proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana dikemukakan Komalasari (2012) mengenai nilai-nilai kehidupan yang dibentuk melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan antara lain “...*religious, honest, tolerant, well mannered, discipline, hard working, creative, independent, democratic, homeland love, respecting achievement, collaborating, and responsible*”

Pembentukan Sikap Anti Korupsi Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam program kulikuleranya menjadi sarana untuk merekayasa masyarakat ke arah kondisi bersih dan peka terhadap permasalahan korupsi. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam program kulikuleranya harus mampu merekonstruksi warga negara muda sekaligus menjadi pendorong dalam masyarakat untuk memiliki pengetahuan, sekaligus menjadi pendorong dalam masyarakat untuk memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku menjauhi korupsi dan menebalkan sikap anti korupsi.

Lingkungan persekolahan dan perguruan tinggi merupakan tempat untuk menanamkan nilai-nilai baik kepada warga negara muda. Nilai-nilai yang ditanamkan itu hendaknya secara universal berlaku bagi seluruh manusia dimanapun dan kapanpun dan relatif tetap dari masa ke masa. Penanaman nilai-nilai yang baik merupakan salah satu tujuan pendidikan. Tokoh filsafat idealisme seperti, Plato, Hegel, Kant dalam Harmanto (2012) bahwa:

nilai-nilai kebaikan dan kebajikan bukanlah sesuatu yang dapat diajarkan sebagaimana pembelajaran sains tetapi lebih pada habituasi dan contoh riil antar individu dalam masyarakat, sehingga tatanan baru dalam pendidikan nilai diawali dengan membangun tatanan dan sistem yang sarat nilai pula.

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis nilai kehidupan dengan mempertimbangkan nilai ideologi, agama, dan budaya sebagaimana dikemukakan sebelumnya merupakan satu bentuk pola pendidikan yang dapat digunakan sebagai penanaman nilai kepada warga negara muda termasuk di dalamnya nilai-nilai anti korupsi. Ditinjau dari filsafat idealisme menurut Harmanto (2012) bahwa “nilai anti korupsi merupakan nilai yang tetap atau

setidaknya sulit diubah karena dianggap sesuatu yang baik dan benar sebagai lawan dari perilaku korupsi yang dinilai tidak baik, tidak jujur dan tidak benar”. Nilai-nilai antikorupsi merupakan antithesis dari korupsi itu sendiri, seperti ketidakjujuran, memanipulasi, rendahnya rasa malu dan serakah. Kartono (2005) memberikan sebutan “patologi sosial” bagi perilaku-perilaku demikian yang tidak mengindahkan norma-norma dan menyimpang dalam kehidupan sosial masyarakat. Korupsi bisa disamakan dengan patologi sosial karena korupsi telah menyebar dan menjadi virus yang berbahaya bagi bangsa Indonesia

Tujuan penanaman nilai-nilai antikorupsi adalah untuk memberikan bekal pengetahuan dasar tentang korupsi, penyadaran pentingnya sikap anti korupsi sehingga memiliki kepekaan yang kuat terhadap perilaku korupsi. Oleh karena itu lebih lanjut diperlukan internalisasi yang diharapkan mampu memahami dan lebih jauh mampu menerima nilai-nilai anti korupsi sebagai bagian dari hidup karena dapat “memuaskan disposisi-kebutuhan (dorongan hati dan kultur) secara memadai” (Parson dan Shils, dalam Ritzer dan Goddman, 2006: 131).

PENUTUP

Simpulan

Saran

DAFTAR PUSTAKA

- Cogan, J. (1998). *Citizenship Education for the 21st Century: Setting the Context*. London: Kogan Page Ltd.
- Harmanto. (2012). *Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran PKn Sebagai Penguat Karakter Bangsa*. Disertasi. Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung: Tidak Diterbitkan.
- Kartono, K. (2005). *Patologi Sosial Jilid I Edisi Baru*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Komalasari, K. (2012). *The Living values-Based Contextual Learning to Develop Student Character*. *Journal Of Social Sciences*, 246-251.
- Lickona, T. (1991). *Educating for Character (How our school can teach respect and responsibility)*. United States : A Bantam Book.

- Ritzer, G., & Goodman, J. D. (2006). *Teori Sosiologi Modern Jilid 6. Diterjemahkan Oleh Tim Penerjemah*. Jakarta: Pustaka Kencana.
- Sumantri, E. (2008). *An Outline of Citizenship and Moral Education in Major Countries Of Southest Asia*. Bandung: Bintang WarliArtika.
- Winataputra, U., & Budimansyah, D. (2007). *Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan ajar, dan Kultur Kelas*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPS UPI.
- Zuriah, N. (2007). *Pendidikan Moral Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan*. Bandung: Bumi Aksara.

